

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2019**



**DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN
KOTA BLITAR
JI. JAWA 64 C KOTA BLITAR
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahNya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2018 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Jukni Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LkjIP sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good government*). Dengan acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD 2016-2021 Kota Blitar.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih belum sempurna, menyadari keterbatasan yang ada maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2018 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 7 Februari 2020
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar

The image shows a blue circular official stamp of the Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA', 'DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN', and 'KOTA BLITAR'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name 'ARIANTO S.Sos.,M.Si.' is printed in bold, followed by the title 'Pembina Utama Muda' and the NIP number '19691018 199101 1 001'.

ARIANTO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- f. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021) adalah :

**“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera
Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada pada :

Misi ketiga : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
			Meningkatnya pengawasan Perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN ADMINISTRASI UMUM

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

URUSAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PASAR

4. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
5. Program Pengembangan Pasar Tradisional
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan

URUSAN PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

7. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
8. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
9. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian
11. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 3 sasaran strategis/ kinerja utama, yaitu :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 7,5 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 600 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,25 % dengan realisasi sebesar 7,5 %.

II. Meningkatnya Pengawasan Alat UTPP

dari hasil perhitungan, persentase peningkatan pengawasan perdagangan sebesar 6,14 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 122,8 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 5 % dengan realisasi sebesar 6,14 %.

III. Meningkatnya Produktivitas Industri

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan nilai produksi industri sebesar 4,4 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 1.466,7 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 0,35 % dengan realisasi sebesar 4,4 %.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor perdagangan dan industri telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya. namun tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Belum tersedianya tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Belum terlaksananya penempatan pedagang di kios Stadion Supriadi
- c. Pengelolaan pasar tradisonal belum maksimal
- d. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri
- e. Pada momen tertentu terjadi kenaikan harga bahan pokok
- f. Pada momen tertentu masih terjadi kelangkaan bahan penting
- g. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi
- h. Pelaku IKM masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- a. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Mengadakan pembinaan, evaluasi dan monitoring PKL, serta Menata tempat sesuai peruntukan PKL
- c. Melakukan Pemeliharaan/ pembangunan pasar tradisional serta melakukan penataan dan pembinaan pedagang pasar
- d. Sudah mengajukan penilaian untuk mendapatkan SKKPTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/ Tera Ulang) untuk unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada akhir tahun 2019, dan pada tahun 2020 sudah dapat melakukan pelayanan tera/ tera ulang sendiri
- e. Selalu mengadakan monitoring bahan pokok, pendataan gudang bahan pokok dan penting, serta wajib lapor pemilik gudang
- f. Meningkatkan frekuensi operasi gabungan dengan OPD terkait
- g. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri
- h. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam even pameran/ promosi produk

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. DASAR HUKUM	5
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	5
F. ISU-ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	11
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019	16
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 – 2019	22
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	23
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	24
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	26
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	26
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	28
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	28
BAB IV PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. LANGKAH PERBAIKAN	29
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2016-2021 (terbaru)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2018	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mempunyai tugas Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2019, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2016-2021, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2019 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Blitar.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKJIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka LKJIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Karena LKJIP tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

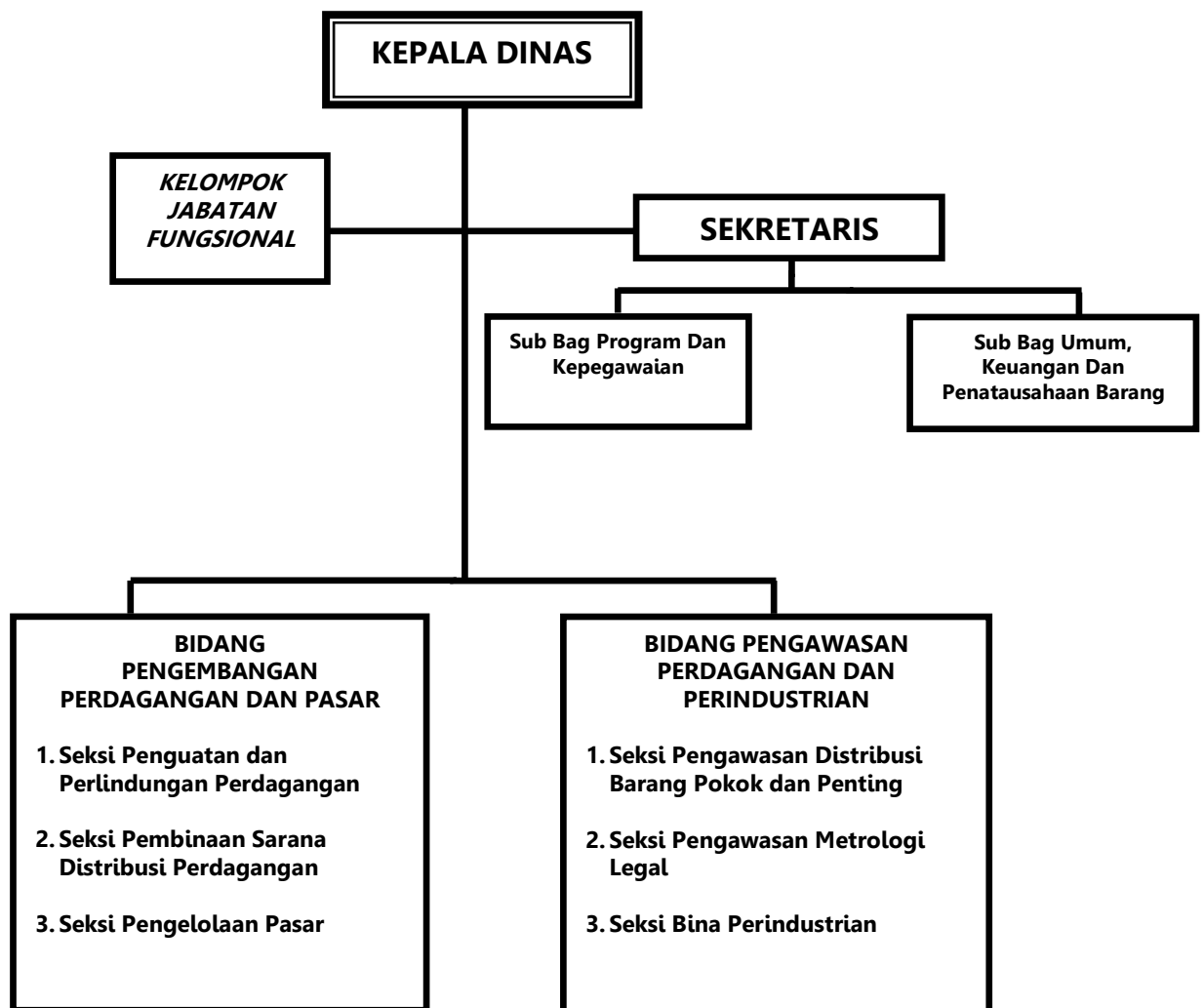
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- o. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- p. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- r. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- s. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- t. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- u. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- v. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- x. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- y. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- z. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- aa. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- bb. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR



C. MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2019 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar selama tahun 2019.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2018, antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2016 – 2021
8. Perda Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2018
9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) TA 2018

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek- aspek strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar :

1. Kota Blitar mempunyai 9 pasar tradisional yang dapat dimaksimalkan sebagai pusat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di Kota Blitar dan sekitarnya
2. Kota Blitar sebagai pusat perdagangan dan jasa
3. Banyaknya potensi industri kecil yang dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih besar

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar antara lain :

1. Rendahnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan
2. Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku
3. Belum maksimalnya kegiatan dan pelayanan unit metrologi legal
4. Masih adanya pedagang minol illegal di Kota Blitar
5. Kapasitas pelaku usaha industri masih rendah

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2016-2021) adalah :

**“Masyarakat Kota Blitar Semakin Sejahtera
Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian berada pada:

Misi ketiga : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berorientasi pada Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
			Meningkatnya pengawasan Perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN ADMINISTRASI UMUM

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

URUSAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DAN PASAR

12. Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan
13. Program Pengembangan Pasar Tradisional
14. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan

URUSAN PENGAWASAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

15. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan
16. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
17. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
18. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian
19. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2. Rencana Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM
1	2		3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	$\{(Volume\ usaha\ perdagangan\ tahun\ n - Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)) / Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	1,25	%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan • Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan • Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	$\{(Jumlah\ pedagang\ yang\ diawasi\ (UTTP,\ BDKT,\ Minol\ dan\ Rokok\ Ilegal)\ tahun\ n - Jumlah\ pedagang\ yang\ diawasi\ (UTTP,\ BDKT,\ Minol\ dan\ Rokok\ Ilegal)\ tahun\ (n-1)\} / Jumlah\ pedagang\ yang\ diawasi\ (UTTP,\ BDKT,\ Minol\ dan\ Rokok\ Ilegal)\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	5	%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan • Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	$\{(Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ n - Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)) / Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	0,35	%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian • Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran, yang terdiri dari :
 - Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2019
 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 – 2019
 - Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra
 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)
2. Akuntabilitas Keuangan, yang terdiri dari :
 - Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3. Prestasi/ Penghargaan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2019

Pengukuran kinerja berisi sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2019

Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	%	1,25	7,5 %	600
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	%	5	6,14	122,8
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	%	0,35	4,4	1.466,7

Tabel. III.3. Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) tahun 2019

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	%	100	100	100
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	46	46	100
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	13	13	100
		Jumlah lembar penggandaan	lembar	44.000	31.525	72
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	2	2	100
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1.000	1.360	136
		Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	porsi	200	300	150
		Jumlah paket makanan khas daerah yang tersedia	macam	2	4	200
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	70	104	149
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	orang	50	50	100
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	108	108	100
		Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	16	20	125
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	komponen	8	12	150
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	macam	25	31	124
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	2	2	100
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	3	3	100
		Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	macam	5	7	140
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	3	6	200
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	11	11	100
		Jumlah mebeulair yang terpelihara	macam	4	4	100
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	dokumen	4	4	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	dokumen	3	3	100
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	%	100	100	100
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Jumlah Event daerah dan Hari Besar Nasional yang diikuti	even	3	3	100
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	publikasi	13	13	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	dokumen	10	10	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	%	5	7,14	137
10	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	unit usaha	400	400	100
		Jumlah PKL yang didata	unit usaha	750	750	100
11	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	pedagang	500	500	100
		Jumlah usaha perdagangan yang didata	unit usaha	12.000	574	4,8
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	%	65	67	103
12	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	unit	4	4	100
VI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	Kontak dagang	2	4	200
13	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	fasilitasi promosi	3	3	100
VII	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Alat UTTP yang ditera/tera ulang	%	35	0,93	2,6
14	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera Ulang	Alat UTTP	5.000	81	1,6
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	orang	270	270	100,0
		Jumlah alat UTTP yang didata	Alat UTTP	6.000	8.740	145,7
		Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	unit	750	750	100,0

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
15	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	Informasi Harga	640	800	125,0
		Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	orang	420	420	100,0
VIII	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	%	0	0	100
16	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah Pedangan Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	pedagang rokok	300	360	120
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	%	1,25	0,69	55
17	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	unit usaha industri	10	33	330
		jumlah unit usaha yang terfasilitasi dalam pameran dalam daerah	Unit usaha	200	200	100
		Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	15	15	100
X	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	%	75	75	100,0
18	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	orang	100	100	100
XI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	%	6,25	7,43	118,9
19	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	unit usaha industri	415	360	87
		jumlah dokumen monev pelatihan	dokumen	10	10	100
		jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	unit usaha	15	15	100
20	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	Pengunjung	25	25	100

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2019

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, terdapat 3 sasaran strategis/ kinerja utama, adapun analisa dari ketiga sasaran strategis/ kinerja utama tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang pertama ini, capain indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \left\{ \left(\frac{\text{Volume usaha perdagangan tahun } n - \text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)}{\text{Volume usaha perdagangan tahun } (n-1)} \right) \right\} \times 100 \% \\ &= \left\{ \frac{985.762.612.000 - 916.982.914.000}{916.982.914.000} \right\} \times 100 \% \\ &= 7,5 \% \text{ (Sumber data : Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar)} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 7,5 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 600 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1,25 % dengan realisasi sebesar 7,5 %.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan volume usaha perdagangan di Kota Blitar yaitu melalui strategi meningkatkan kuantitas dan kualitas perdagangan.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan di Kota Blitar, yaitu :

1. **Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan**, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan sub kegiatan :
 - Updating Pendataan PKL
 - Pengadaan Kartu PKL
 - Pembinaan PKL dan asongan
 - Pengadaan papan informasi PKL dan asongan
 - b. Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan, dengan sub kegiatan :
 - Gebyar Pasar

- Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan
 - Fasilitasi Pembinaan Ekspor Impor
 - Pendataan Pelaku Usaha Perdagangan
 - Pengadaan kelengkapan peralatan Pusat Kuliner (Bak sampah, lampu sorot, dan CCTV)
2. **Program Pengembangan Pasar Tradisional**, dengan kegiatan:
- a. Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional, dengan sub kegiatan :
- Sosialisasi relokasi pedagang pasar legi
 - Relokasi Pedagang Pasar legi
 - Pembangunan Pasar Legi
 - Pengecatan pasar
 - Pembangunan pagar Pasar Dimoro
 - Pembangunan Rumah Timbangan
3. **Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan**, dengan Kegiatan :
- a. Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Bidang Perdagangan, dengan sub kegiatan :
- Promosi Produk Khas Kota Blitar ke luar Daerah
 - Pameran Produk Khas Kota Blitar di 3 Kecamatan
 - Pameran Produk Khas Kota Blitar Menjelang Idul Fitri

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Belum tersedianya tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Belum terlaksananya penempatan pedagang di kios Stadion Supriadi
- c. Pengelolaan pasar tradisonal belum maksimal

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- b. Mengadakan pembinaan, evaluasi dan monitoring PKL, serta Menata tempat sesuai peruntukan PKL

- c. Melakukan Pemeliharaan/ pembangunan pasar tradisional serta melakukan penataan dan pembinaan pedagang pasar

II. Meningkatnya Pengawasan Perdagangan

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang kedua ini, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned} \text{Formulasi} &= \left\{ \frac{\text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } n - \text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1)}{\text{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun } (n-1)} \right\} \times 100 \% = \left(\frac{1902-1792}{1.902} \right) \times 100 \% \\ &= 6,14 \% \text{ (Sumber data : Disdagin Tahun 2018)} \end{aligned}$$

dari hasil perhitungan, persentase peningkatan pengawasan perdagangan sebesar 6,14 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 122,8 % dengan kategori **tidak berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 5 % dengan realisasi sebesar 6,14 %.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase alat UTTP bertanda tera sah, yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Operasionalisasi dan Pengaturan Pengembangan Kemetrolgian Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Sosialisasi BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) bagi pelaku usaha makanan dan minuman 2 (dua) kali dengan jumlah peserta 45 orang.
 - Sosialisasi metrologi bagi wajib tera/ pemilik alat UTTP 3 (tiga) kali dengan jumlah peserta 60 orang
 - Pengawasan BDKT
 - Pengawasan Alat UTTP
 - Pelayanan tera/tera ulang sejumlah 171 UTTP ditera/tera ulang
 - Pendataan pemilik UTTP wilayah Kota Blitar
 - Pengadaan peralatan Metrologi dan Kendaraan Operasional
- b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Kebutuhan Pokok, Penting dan Minuman Beralkohol, dengan sub kegiatan :

- Sosialisasi Bahaya Minuman Beralkohol bagi Masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 420 orang
- Monitoring harga sembako dan stok bahan pokok secara rutin
- Siaran radio Adlips harga sembako

2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Program ini didukung kegiatan Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, substansi kegiatannya adalah melakukan pengumpulan informasi rokok yang dilekati pita cukai palsu dari pedagang rokok di seluruh wilayah Kota Blitar.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, terlihat dari pencapaian target yang masuk kategori tidak berhasil, hal ini dikarenakan beberapa masalah antara lain :

- a. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri
- b. Pada momen tertentu terjadi kenaikan harga bahan pokok
- c. Pada momen tertentu masih terjadi kelangkaan bahan penting

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan meyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Sudah mengajukan penilaian untuk mendapatkan SKKPTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/ Tera Ulang) untuk unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada akhir tahun 2019, dan pada tahun 2020 sudah dapat melakukan pelayanan tera/ tera ulang sendiri
- b. Selalu mengadakan monitoring bahan pokok, pendataan gudang bahan pokok dan penting, serta wajib lapor pemilik gudang
- c. Meningkatkan frekuensi operasi gabungan dengan OPD terkait

III. Meningkatnya Produktivitas Industri

Dalam sasaran strategis/ kinerja utama yang ketiga ini, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan

$$\begin{aligned} \text{formulasi} &= \{(\text{Nilai produksi industri tahun } n - \text{Nilai produksi} \\ &\quad \text{industri tahun } (n-1)) / \text{Nilai produksi industri tahun } (n- \\ &\quad 1)\} \times 100 \% \\ &= \{(772.131.687 - 739.675.715) / 739.675.715\} \times 100 \% \end{aligned}$$

= 4,4 % (Sumber data : Disdagin Tahun 2019)

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan nilai produksi industri sebesar 4,4 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 1.257,1 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 0,35 % dengan realisasi sebesar 4,4 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja utama tersebut, melalui beberapa program, yaitu :

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat, dengan sub kegiatan :

- Pelatihan Pembuatan Aneka Kue Berbahan dasar tepung; dilaksanakan selama 7 hari dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang
- Pelatihan pengemasan makanan olahan; dilaksanakan selama 7 hari dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang
- Pelatihan teknik dasar batik; dilaksanakan selama 12 hari dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, sebanyak 2 kali dengan peserta yang berbeda
- Pelatihan pembuatan tas; dilaksanakan selama 7 hari dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang
- Pelatihan pembuatan keset berbahan dasar perca; dilaksanakan selama 5 hari dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang
- Pelatihan olahan pangan berbahan dasar sayuran; dilaksanakan selama 5 hari dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang
- Pelatihan kerajinan anyaman berbahan dasar mendong; dilaksanakan selama 7 hari dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang
- Pelatihan peningkatan kualitas produk industri batik; dilaksanakan selama 7 hari dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang, sebanyak 2 kali dengan peserta yang berbeda

- Pelatihan Diversifikasi Kerajinan Berbahan Tempurung Kelapa; dilaksanakan selama 10 hari dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang
 - Pelatihan peningkatan kualitas produk industri kaos; dilaksanakan selama 10 hari dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang
 - Validasi data IKM Kota Blitar Tahun 2019
- b. Fasilitasi Promosi bagi usaha mandiri masyarakat bidang Perindustrian, dengan sub kegiatan :
- Bazar Batik dan Aksesoris Daerah, dilaksanakan sebanyak 6 kali, bertempat di Jalan Kenanga Kota Blitar, dengan peserta sebanyak 80 pelaku usaha industri;
 - Bazar Kerajinan Daerah, dilaksanakan sebanyak 6 kali, bertempat di Jalan Kenanga Kota Blitar, dengan peserta sebanyak 80 pelaku usaha industri;
 - Bazar Makanan dan Minuman Daerah, dilaksanakan sebanyak 6 kali, bertempat di Jalan Kenanga Kota Blitar, dengan peserta sebanyak 80 pelaku usaha industri;

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Program ini didukung oleh Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah melalui pelaksanaan Pameran Bazar Blitar Djadoel 1 kali kegiatan yang berlokasi di aloon aloon kota blitar dengan peserta dari unsur OPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar, perbankan, organisasi profesi dan sosial kemasyarakatan, persekolahan, pelaku usaha industri mikro dan kecil serta pedagang kaki lima di kota blitar.

3. Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

Program ini didukung oleh Kegiatan Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar Tar dan Nikotin Rendah Melalui Fasilitasi Pengujian Tar dan Nikotin bagi IKM, dan Penerapan Good Manufacturing Practise bagi IHT , dengan sub Kegiatan :

- Uji tar dan nikotin rokok yang beredar di Kota Blitar
- Sosialisasi penerapan *Good Manufacturing Practices* kepada Industri Hasil Tembakau

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi
- b. Pelaku IKM masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri
- b. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam even pameran/ promosi produk

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 – 2019

Tabel. III.4. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019	CAPAIAN TAHUN 2019 THD CAPAIAN TAHUN 2018
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	-	7,5 %	-
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	-	6,4 %	-
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	2,34 %	4,4 %	188 %

Dari hasil evaluasi Implementasi SAKIP oleh Kemenpan RI, Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2019 harus melakukan perubahan Sasaran Strategis dan indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama PD. Yang lebih jelasnya dapat dilihat pada table III.5 di bawah ini :

Tabel. III.5. Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 dan Tahun 2019

Sasaran Strategis Tahun 2018	Indikator Kinerja Tahun 2018	Sasaran Strategis Tahun 2019	Indikator Kinerja Tahun 2019	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Berubah Indikator
Meningkatnya pengawasan Alat UTTP	Persentase alat UTTP bertanda terasah	Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	Berubah sasaran strategis dan indikator sasaran strategis
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	tetap

Dapat dilihat untuk IKU pertama dan kedua mengalami perubahan indikator, sehingga capaian 2018 tidak dapat dibandingkan dengan capaian 2019, yang tidak mengalami perubahan hanya IKU ketiga, dimana terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 188 %.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra

Tabel. III.6. Perbandingan realisasi kinerja IKU 2019 dengan target akhir renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	REALISASI KINERJA S.D TAHUN 2019	TARGET AKHIR RENSTRA 2016-2021 (%)	CAPAIAN TAHUN 2019 THD TARGET AKHIR RENSTRA (%)
1	2	5	6	7
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	7,5 %	1,75 %	428,6 %
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	6,4	10 %	64 %
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	4,4 %	0,45 %	977,8 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan, pencapaian realisasi indikator kinerja utama pertama pada tahun 2019, memberi capaian yang signifikan terhadap target akhir Renstra 2016-2021, yaitu sebesar 428,6 %, tidak dipungkiri, besarnya persentase capaian kinerja IKU pertama ini dikarenakan kurangnya data awal yang dimiliki PD, sehingga dalam penentuan target tahunan ataupun target akhir RENSTRA terlalu kecil. Sedangkan untuk indikator kinerja utama kedua memberikan kontribusi sebesar 64 %, sedangkan untuk pencapaian persentase peningkatan nilai produksi industri mencapai 100 % lebih, hal ini dikarenakan pada saat menyusun Renstra PD, penentuan IKU hanya dilakukan regresi linier dari data yang sudah ada, sehingga penentuan target kinerja tidak valid.

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2019 melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 11 (sebelas) program dan 20 (dua puluh) kegiatan serta mengelola anggaran sebesar Rp. 69.179.893.063,66,- dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung seperti tabel di bawah ini :

Tabel III.7. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Langsung

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Belanja Tidak Langsung	6.595.917.968	5.425.025.294	82,25
2.	Belanja Langsung	62.583.975.095,66	47.623.683.464,13	76,10
	Jumlah	69.179.893.063,66	53.048.708.758,13	76,68

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini

Tabel III.8. Realisasi Anggaran Belanja Langsung untuk Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2019

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	2.361.757.100	47.623.683.464,13	76,103
1	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	114.990.000	102.661.000	89,28
2	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	200.209.010	195.886.777	97,84
3	Penyediaan Jasa Perkantoran	1.627.458.090	1.440.000.650	88,48
4	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana	409.100.000	386.006.477	94,36

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Perkantoran			
5	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	6.800.000	6.800.000	100
6	Penyusunan Laporan Keuangan	3.200.000	3.200.000	100
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	70.000.000	70.000.000	100
7	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	50.000.000	50.000.000	100
8	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100
III	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	5.000.000	5.000.000	100
9	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	681.300.000	575.457.600	84,46
10	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	229.473.000	175.697.900	76,57
11	Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	451.827.000	399.759.700	88,48
V	PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	54.902.999.395,66	40.659.592.290,13	74,06
12	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	54.902.999.395,66	40.659.592.290,13	74,06
VI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	500.000.000	396.041.000	79,21
13	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	500.000.000	396.041.000	79,21
VII	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	1.914.068.600	1.613.213.286	84,28
14	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	1.737.313.900	1.465.370.986	84,35
15	Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	176.754.700	147.842.300	83,64
VIII	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	30.000.000	17.999.300	60
16	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	30.000.000	17.999.300	60
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	573.850.000	572.880.200	99,83
17	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	573.850.000	572.880.200	99,83
X	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	75.000.000	59.936.809	79,92
18	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	75.000.000	59.936.809	79,92
XI	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	1.470.000.000	1.419.008.075	96,53
19	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan	1.000.000.000	975.723.075	97,57

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Masyarakat			
20	Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	470.000.000	443.285.000	94,32

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tabel III.9. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	56.084.299.395,66	89,61
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	1.944.068.600	3,11
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	2.118.850.000	3,52
JUMLAH		60.147.217.995,66	96,24

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel III.10. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	5,2 %	8,9 %	171,2 %	56.084.299.396	41.631.090.890	74,23
Program 1.1 Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan	Persentase usaha yang memperoleh fasilitasi pengembangan kapasitas	5 %	7,14 %	137 %	681.300.000	575.457.600	84,46
Program 1.2 Pengembangan Pasar Tradisional	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	65 %	67 %	103 %	54.902.999.395,66	40.659.592.290,13	74,06

Program 1.3 Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perdagangan	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	2 kontak dagang	4 kontak dagang	200 %	500.000.000	396.041.000	79,21
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	5 %	6,14 %	122,8 %	1.944.068.600	1.631.212.586	83,91 %
Program 2.1 Pengawasan Dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Alat UTP yang ditera/tera ulang	305%	1,96 %	5,6 %	1.914.068.600	1.613.213.286	84,28
Program 2.2 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	0 %	0 %	100 %	30.000.000	17.999.300	60
Sasaran 3 Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	0,35 %	4,4 %	1.466,7%	3.235.120.560,00	2.918.672.546	90,22 %
Program 3.1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	1,25 %	0,69 %	55 %	573.850.000	572.880.200	99,83
Program 3.2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perindustrian	Persentase Industri Kecil Terlatih	6,25	7,43 %	13 %	1.470.000.000	1.419.008.075	96,53
Program 3.3 Program Pembinaan Industri (Dbhcht)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	75 %	75 %	100 %	75.000.000	59.936.809	79,92

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	600 %	74,23%	8,1
Meningkatnya pengawasan Perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	122,8 %	83,91 %	1,46
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	1.466,7%	90,22 %	16,26

C. Prestasi/ Penghargaan

Prestasi atau penghargaan yang pernah diraih Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada tahun 2019, antara lain :

1. Hasil Evaluasi SAKIP pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar 84,47 dengan kategori A (memuaskan) dan menduduki peringkat ke-5 dari 29 OPD yang ada di Pemerintah Kota Blitar
2. Juara 3 Stand Terbaik pada Pameran Potensi Daerah Berskala Nasional 3rd JATIM TRADE EXPO 2019 pada 14-17 November 2019 di Mall City of Tomorrow (CITO) Surabaya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor perdagangan dan industri telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya. namun tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- i. Belum tersedianya tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum
- j. Belum terlaksananya penempatan pedagang di kios Stadion Supriadi
- k. Pengelolaan pasar tradisonal belum maksimal
- l. Untuk pelayanan tera/tera ulang, Kota Blitar Belum mampu melakukan pelayanan tera/tera ulang sendiri
- m. Pada momen tertentu terjadi kenaikan harga bahan pokok
- n. Pada momen tertentu masih terjadi kelangkaan bahan penting
- o. Masih kurangnya kemampuan pelaku IKM dalam usaha peningkatan mutu produksi
- p. Pelaku IKM masih kesulitan dalam pemasaran hasil produksi

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- i. Membangun Shelter PKL sebagai tempat relokasi PKL terdampak pembangunan fasilitas umum

- j. Mengadakan pembinaan, evaluasi dan monitoring PKL, serta Menata tempat sesuai peruntukan PKL
- k. Melakukan Pemeliharaan/ pembangunan pasar tradisional serta melakukan penataan dan pembinaan pedagang pasar
- l. Sudah mengajukan penilaian untuk mendapatkan SKKPTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/ Tera Ulang) untuk unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada akhir tahun 2019, dan pada tahun 2020 sudah dapat melakukan pelayanan tera/ tera ulang sendiri
- m. Selalu mengadakan monitoring bahan pokok, pendataan gudang bahan pokok dan penting, serta wajib lapor pemilik gudang
- n. Meningkatkan frekuensi operasi gabungan dengan OPD terkait
- o. Diberikan bimbingan teknis atau pembinaan dan pendampingan sesuai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku industri
- p. Mengikutkan pelaku usaha industri dalam even pameran/ promosi produk

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar serta dapat mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 7 Februari 2020

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



The image shows a circular official stamp of the City of Blitar, Department of Trade and Industry. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA', 'DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN', and 'KOTA BLITAR'. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed: 'ARIANTO S. Sos. M. Si.', 'Pembina Utama Muda', and 'NIP. 19691018 199101 1 001'.

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR
TAHUN 2016-2021**

TUJUAN										SASARAN									CARA MENCAI TUJUAN DAN SASARAN		KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					KEBIJAKAN		PROGRAM
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	{(nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n – nilai PDRB sektor Perdagangan tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1)} x 100 %	11,66 %	12,9 %	11 %	11,2 %	11,3 %	11,4 %	11,5 %	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	{(volume usaha perdagangan tahun n – volume usaha tahun (n-1))/ volume usaha tahun (n-1)} x 100 %	-	-	-	-	1,25 %	1,5 %	1,75 %	Pengembangan perdagangan yang mampu mendorong distribusi barang dan jasa, dan pengembangan produk-produk unggulan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta masyarakat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perdagangan	
																			Revitalisasi pasar tradisional	Program Pengembangan Pasar Tradisional		
																			Menginventarisir data kelembagaan usaha perdagangan guna menciptakan penataan dan penertiban para pelaku usaha kecil dan menengah	Program Pengembangan dan Penguatan Perdagangan		
										Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	{(Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun n – Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1))/ Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP,	-	-	-	-	5 %	7,5 %	10 %	Meningkatkan pengawasan perdagangan yang lebih menitik beratkan pada pengawasan alat Ukur, Timbang, Takar dan Peralatannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus	Program Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	

												BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)) x 100 %								(BDKT), Minuman Beralkohol	
																				Pengawasan dan pengumpulan informasi Hasil Tembakau yang dilekati pita cukai palsu	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)
	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	{{nilai PDRB Sektor Industri tahun n - nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1)}/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1)} x 100 %	12,39 %	9,92 %	11,5 %	11,55 %	11,6 %	11,65 %	11,7 %	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi Industri	{{Jumlah nilai produksi ndustry tahun n – Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1)}/ Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1)} x 100 %	-	-	0,25 %	0,3%	0,35 %	0,4%	0,45 %	Mengembangkan sektor industri yang dapat menciptakan struktur ekonomi yang kuat dengan menggunakan teknologi tepat guna serta memanfaatkan sumber daya lokal yang ada sehingga mempunyai value added dan meningkatkan daya beli masyarakat	- Program Pengembangan Industri Kecil Menengah - Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Bidang Perindustrian - Program Pembinaan Industri (DBHCHT)

RENCANA KINERJA TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	1,25 %	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PERDAGANGAN	Persentase usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	5%	Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	400	unit usaha	229.473.000
							Jumlah PKL yang didata	750	unit usaha	
						Pengembangan dan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang dibina	500	pedagan g	451.827.000
							Jumlah usaha perdagangan yang didata	12.000	unit usaha	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL	Persentase Pasar dalam Kondisi Baik	65 %	Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Jumlah bangunan pasar yang direvitalisasi	4	unit	54.902.999.395,66
			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERDAGANGAN	Jumlah Kontak Dagang dengan Daerah Lain	2 Kontak Dagang	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat (bidang perdagangan)	Jumlah fasilitasi promosi bagi usaha perdagangan dalam dan luar daerah	3	fasilitasi promosi	500.000.000
Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	5 %	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGAMANAN	Persentase Alat UTP yang ditera/tera ulang	35 %	Pengelolaan Pengawasan Metrologi Legal	Jumlah Alat UTP yang ditera/ tera Ulang	5.000	Alat UTP	1.737.313.900

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PERDAGANGAN						
							Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	270 orang	
							Jumlah alat UTTP yang didata	6.000 Alat UTTP	
							Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	750 unit	
						Pengawasan distribusi kebutuhan pokok, penting dan peredaran minuman beralkohol	Jumlah publikasi informasi harga bahan pokok	640 Informasi Harga	176.754.700
							Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	420 orang	
			PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase Pelanggar Barang Kena Cukai Ilegal	0 %	Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati Pita Cukai Palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran	Jumlah Pedangan Rokok yang dimintai Informasi Tentang Pita Cukai Palsu	300 pedagang rokok	30.000.000
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	0,35 %	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Persentase Pertumbuhan Jumlah IKM	1,25 %	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	jumlah peningkatan industri kecil	10 unit usaha industri	573.850.000
							jumlah unit usaha yang	200 Unit	

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							terfasilitasi dalam pameran dalam daerah		usaha	
							Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	15	Pengunjung	
			PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI (DBHCHT)	Persentase IHT yang Menerapkan GMP	75 %	Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi IKM, serta pelatihan dan penerapan good manufacturing practises bagi IHT	Jumlah pengusaha Industri Hasil Tembakau yang mengikuti sosialisasi penerapan GMP	100	orang	75.000.000
			PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL (DBHCHT) BIDANG PERINDUSTRIAN	Persentase Industri Kecil Terlatih	6,25 %	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Industri Kecil yang Dilatih	415	unit usaha industri	1.000.000.000
							jumlah dokumen monev pelatihan	10	dokumen	
							jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan paska pelatihan	15	unit usaha	
						Kegiatan Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah pengunjung yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	25	Pengunjung	470.000.000

**PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	$\{(\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{volume usaha tahun } (n-1)) / \text{volume usaha tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	1,25 %				Program Pengembangan Dan Penguatan Perdagangan	681.300.000	575.457.600	84,46	
								Program Pengembangan Pasar Tradisional	54.902.999.395,66	40.659.592.290,13	74,06	
								Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perdagangan	500.000.000	396.041.000	79,21	
	Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	{(Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun n – Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)) / Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP,	5 %	6,14 %			Program Pengawasan Dan Pengamanan Perdagangan	1.914.068.600	1.613.213.286	84,28	
			pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)) / Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP,					Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Perdagangan)	30.000.000	17.999.300	60	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1))} x 100 %									
	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	{{Jumlah nilai produksi Industry tahun n – Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1)}/ Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1}} x 100 %	0,35 %	4,4 %			Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	573.850.000	572.880.200	99,83	
								Program Pembinaan Industri (Dbhcht)	75.000.000	59.936.809	79,92	
								Program Pembinaan Lingkungan Sosial (Dbhcht) Bidang Perindustrian	1.470.000.000	1.419.008.075	96,53	